



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR :503.05/KEP.118 -DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA UNIT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Cirebon diperlukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503.05/Kep.164-DPMPTSP/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disesuaikan dengan kewenangan di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cirebon;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan Non Perijinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas pokok Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah :

- a. melakukan analisa/kajian teknis, peninjauan dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap objek perizinan sebagai dasar penerbitan diterima, atau ditolaknya perizinan;
- b. melakukan pelaporan kepada Perangkat Daerah teknis mengenai pertimbangan teknis dan analisa kajian sesuai kewenangan bidang urusan pemerintahan masing-masing;
- c. melakukan penerbitan dokumen berupa berita acara pertimbangan teknis mengenai diterima untuk diterbitkan atau ditolaknya perizinan yang ditandatangani oleh ketua Tim Teknis dan anggota;
- d. menerbitkan rekomendasi teknis mengenai diterima untuk diterbitkan atau ditolaknya perizinan yang ditandatangani oleh ketua tim teknis;
- e. melakukan perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan yang ditandatangani oleh ketua tim teknis; dan
- f. memberikan pertimbangan teknis penyelesai pengaduan.

- KETIGA : Jenis-jenis izin, dan non izin yang memerlukan pertimbangan teknis adalah :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) / Izin Toko Swalayan;
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Surat Persetujuan Pamcran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal;
 6. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
 7. Izin usaha Industri Kecil (IUIK / TDI);
 8. Izin usaha Industri Menengah (IUIM/ IUI);
 9. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK/TDUP);
 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), IMB Rancang Bangun Reklame, Izin Tower/Menara;
 11. Izin Reklame;
 12. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 13. Ijin Trayek;
 14. Izin Parkir Luar Badan Jalan;
 15. Izin Operasi Angkutan;
 16. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C;
 17. Izin Balai Pengobatan :
 - a. Izin Sementara;
 - b. Izin Tetap;
 18. Izin Rumah Bersalin :
 - a. Izin Sementara;
 - b. Izin Tetap;
 19. Izin Balai Asuhan Keperawatan;
 20. Izin Balai Konsultasi Gizi;
 21. Izin Balai Khitan;
 22. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
 23. Izin Klinik Radiologi;
 24. Izin Klinik CT Scann;
 25. Izin Klinik Fisioterapi;
 26. Izin Optikal;
 27. Izin Toko Obat;
 28. Izin Pest Control;
 29. Izin Pengobatan Tradisional; dan
 30. Izin Lingkungan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor Nomor 503.05/Kep.164-DPMPTSP/2020tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Februari 2021

WALIKOTA CIREBON,



NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 503.05/KEP. 118-DPMPTSP/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

1. SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN PERIZINAN DI KOTA CIREBON

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	TIM TEKNIS		KET
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) / Izin Toko Swalayan; 4. Tanda Daftar Gudang (TDG); 5. Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal; 6. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);	KETUA	: Kepala Bidang Bina Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.	
			SEKRETARIS	: Kepala Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.	
			ANGGOTA	: 1. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon; 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;	

				<ol style="list-style-type: none">4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;6. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;7. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;8. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon;9. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Bidang Bina Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon;10. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan A1 Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;11. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan A2 Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;12. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
--	--	--	--	--

				<ol style="list-style-type: none">13. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;14. Kepala Seksi Penyuluhan Pengawasan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;15. Perangkat Daerah Teknis Terkait.	
--	--	--	--	--	--

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	TIM TEKNIK		KET
2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.	7. Izin usaha Industri Kecil (IUIK); 8. Izin usaha Industri Menengah (IUM);	KETUA	:	
			SEKRETARIS	:	
			ANGGOTA	:	
				<p>Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon; 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. 3. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; 4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon; 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon; 6. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; 	

				<ol style="list-style-type: none">7. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;8. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.9. Kepala Seksi Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan pada Dinas Perdagangan, Kopcrasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon;10. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Kopcrasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon;11. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan A1 Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;12. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan A2 Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;13. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;14. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
--	--	--	--	--

				<p>15. Kepala Seksi Penyuluhan Pengawasan dan Penindakan Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.</p> <p>16. Perangkat Daerah Teknis Terkait.</p>	
--	--	--	--	--	--

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	TIM TEKNIKIS		KET
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.	9. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK/TDUP);	KETUA	:	
			SEKRETARIS	:	
			ANGGOTA	:	
				<p>Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Cirebon.</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.</p> <p>1. Kepala Bidang Bina Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Memengah Kota Cirebon;</p> <p>2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;</p> <p>3. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hdup Kota Cirebon;</p> <p>4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;</p> <p>5. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon;</p>	

				<ol style="list-style-type: none">6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;7. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;8. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;9. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;10. Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Cirebon;11. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan B1 Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;12. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan B2 Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;13. Perangkat Daerah Teknis Terkait.
--	--	--	--	--

				<ol style="list-style-type: none">7. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;8. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;9. Kepala Bidang Pencegahan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;10. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon;11. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;12. Kepala Bidang Penerimaan Pajak I pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon;13. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;14. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;15. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
--	--	--	--	---

				<p>16. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan B1 Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;</p> <p>17. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan B2 Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.</p> <p>18. Perangkat Daerah Teknis Terkait.</p>	
--	--	--	--	---	--

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	TIM TEKNIS		KET
5	Dinas Perhubungan	13. Ijin Trayek; 14. Izin Parkir Luar Badan Jalan; 15. Izin Operasi Angkutan;	KETUA	: Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.	
			SEKRETARIS	: Kepala Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.	
			ANGGOTA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. 2. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknis Sarana pada Perhubungan Kota Cirebon. 3. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 5. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 6. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Bidang Angkutan dan Multimoda pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. 7. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan B1 Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 	

				<p>8. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan B2 Bidang Pelayanan Terpadu B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.</p> <p>9. Perangkat Daerah Teknis Terkait.</p>	
--	--	--	--	---	--

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	TIM TEKNIS	KET
6	Dinas Kesehatan	16. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C; 17. Izin Balai Pengobatan : a. Izin Sementara; b. Izin Tetap; 18. Izin Rumah Bersalin : a. Izin Sementara; b. Izin Tetap; 19. Izin Balai Asuhan Keperawatan; 20. Izin Balai Konsultasi Gizi; 21. Izin Balai Khitan; 22. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; 23. Izin Klinik Radiologi; 24. Izin Klinik CT Scann; 25. Izin Klinik Fisioterapi; 26. Izin Optikal; 27. Izin Toko Obat; 28. Izin Pest Control; 29. Izin Pengobatan Tradisional	KETUA : Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. SEKRETARIS : Kepala Seksi Sarana Kesehatan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. ANGGOTA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. 2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. 3. Kepala Bidang Fisik dan Lingkungan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. 4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. 5. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon. 6. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon 7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. 8. Kepala Bidang lalu Lintas Darat pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. 9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 10. Perangkat Daerah Teknis Terkait. 	

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	TIM TEKNIS		KET
7	Dinas Lingkungan Hidup	30. Izin Lingkungan	KETUA	: Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.	
			SEKRETARIS	: Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.	
			ANGGOTA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. 2. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. 3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. 4. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon. 5. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon 6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. 7. Kepala Bidang lalu Lintas Darat pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. 	

				<ol style="list-style-type: none">8. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon9. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.10. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.11. Perangkat Daerah Teknis Terkait.	
--	--	--	--	--	--

WALI KOTA CIREBON,



NASHRUDIN AZIS